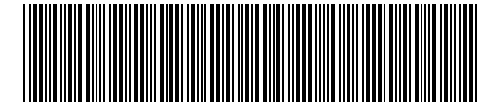




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408769/2020**



DS:2670-4801-6132-7559

**Revisi ke 01**

Tanggal : 18 Februari 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (10)     | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  |
| 3. Provinsi                   | : (07)     | SUMATERA UTARA  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408769) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 3.713.296.000 ( TIGA MILIAR TUJUH RATUS TIGA BELAS JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional  
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	3.713.296.000
Rp.	3.713.296.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	3.713.296.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                     |           |               |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN M E D A N I | (004) Rp. | 3.713.296.000 |
|---------------------|-----------|---------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2670-4801-6132-7559

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Sutrisman  
Bendahara Pengeluaran : GABY MARINTAN ANANDA  
Pejabat Penanda Tangan SPM : SISMOLO

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			3.713.296.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			3.713.296.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional			3.713.296.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional			
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	Anggota	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
	06	Layanan Internal Eselon I	1	Layanan	
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			3.713.296.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2670-4801-6132-7559

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Sutrisman  
Bendahara Pengeluaran : GABY MARINTAN ANANDA  
Pejabat Penanda Tangan SPM : SISMOLO

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	348 Orang		2.784.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	5.699,00	Orang	
Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	47 Kegiatan		501.490.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	758,00	Kegiatan	
Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Kantor Wilayah		80.000.000
Indikator Output Kegiatan	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		160.000.000
Indikator Output Kegiatan	04	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		93.903.000
Indikator Output Kegiatan	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah		93.903.000
Indikator Output Kegiatan	06	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	33	Kantor Wilayah	

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:2670-4801-6132-7559

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408769) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	3.713.296.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.713.296.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



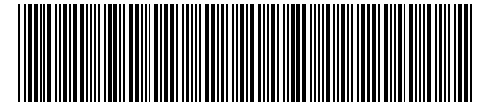
DS:2670-4801-6132-7559

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408769	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	-	3.706.296	7.000	-	-	3.713.296		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	3.706.296	7.000	-	-	3.713.296		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	3.706.296	7.000	-	-	3.713.296		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	-	2.784.000	-	-	-	2.784.000	07 . 51	
01	RM	-	2.784.000	-	-	-	2.784.000	004	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	-	501.490	-	-	-	501.490	07 . 51	
01	RM	-	501.490	-	-	-	501.490	004	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	80.000	-	-	-	80.000	07 . 51	
01	RM	-	80.000	-	-	-	80.000	004	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	160.000	-	-	-	160.000	07 . 51	
01	RM	-	160.000	-	-	-	160.000	004	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	93.903	-	-	-	93.903	07 . 51	
01	RM	-	93.903	-	-	-	93.903	004	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2670-4801-6132-7559

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	86.903	7.000	-	-	93.903	07 . 51	
01	RM	-	86.903	7.000	-	-	93.903	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>3.706.296</b>	<b>7.000</b>	-	-	<b>3.713.296</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2670-4801-6132-7559

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

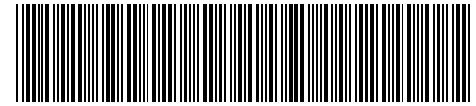
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408769	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	89.100	212.440	302.500	303.160	407.850	397.850	392.570	414.121	390.039	353.023	450.643	3.713.296
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	89.100	212.440	301.771	302.431	407.121	397.121	391.841	413.392	389.310	352.294	449.474	3.706.296
		<b>53 BELANJA MODAL</b>	0	0	0	729	729	729	729	729	729	729	729	1.169	7.000
	013.10.12.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	89.100	212.440	302.500	303.160	407.850	397.850	392.570	414.121	390.039	353.023	450.643	3.713.296
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	89.100	212.440	301.771	302.431	407.121	397.121	391.841	413.392	389.310	352.294	449.474	3.706.296
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	729	729	729	729	729	729	729	729	1.169	7.000

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:2670-4801-6132-7559

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408769] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

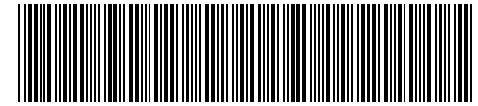
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:2670-4801-6132-7559

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408769] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003